

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era reformasi di Indonesia berdampak pada sistem ketatanegaraan, yaitu terjadi pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (*local democracy*) yang bertumpu pada pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.

Salah satu perubahan pada sistem ketatanegaraan yang terjadi pada era otonomi daerah adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah Langsung merupakan proses perekrutan pejabat politik daerah sebagai pemimpin daerah yang bersangkutan dan dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis tanpa melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Pemilu menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Masyarakat pada dasarnya berharap bahwa pelaksanaan kepala daerah akan terlaksana secara demokratis sebab mereka akan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini merupakan implementasi sistem pemerintahan negara demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai titik sentral tata pemerintahan dan kenegaraan, sebab hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pemilihan kepala daerah merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pejabat pemerintahan daerah. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan kepala daerah merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan dalam bentuk perilaku memilih, yakni memberikan suara dalam pemilihan umum.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat beranekaragam, mulai dari segi suku, agama, sosial, dan budaya. Kondisi ini membutuhkan pemimpin yang pandai dan pintar serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk mengaturnya. Salah satu kelompok masyarakat yang juga berperan dalam proses demokratisasi lokal dengan turut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah masyarakat adat. Masyarakat adat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang terikat dalam suatu kebudayaan yang dianggap sama dan berinteraksi menurut adat istiadat yang sama yang ditunjukkan oleh adanya suatu identitas bersama.

Masyarakat adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung. Secara garis besar masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Pesisir.

Masyarakat beradat Pepadun kebanyakan bermukim di daerah pedalaman, sedangkan yang beradat Pesisir bermukim di daerah pesisir atau di daerah yang tidak termasuk daerah lingkungan pepadun. Termasuk dalam lingkungan beradat pepadun adalah orang-orang Abung, Tulangbawang (Menggala), Waykanan Sungkai, Pubiyan. Sedangkan dalam lingkungan beradat Pesisir adalah orang-orang Pesisir Teluk, Pesisir Semangka, Pesisir Krui, dan dataran tinggi Belalau di daerah Provinsi Lampung.

Terkait dengan konteks Pemilihan Kepala Daerah, perilaku memilih masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah pendekatan sosiologis yaitu kecenderungan menempatkan kegiatan memilih dengan konteks sosial yang

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tempat tinggal, keluarga, teman sepermainan, pekerjaan, dan keyakinan yang dianut. Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.

Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya. Kelompok ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku memilih seseorang, karena kelompok inilah yang mempunyai peranan yang besar dalam menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang terhadap politik.

Perilaku memilih masyarakat juga dapat ditentukan oleh pendekatan rasionalitas yang mereka miliki, seperti menentukan pilihan karena berorientasi pada kandidat atau mereka memilih karena telah mengetahui calon dan program dari kandidat yang akan mereka pilih baik itu melalui sosialisasi langsung dari calon atau partai peserta pemilu ataupun melalui media massa. Pendekatan ini digunakan dengan harapan bahwa dengan pendekatan ini dapat memberikan pandangan mengenai ketertarikan seseorang untuk memilih yang didasari atas kemampuan untuk menilai figur kandidat, isu-isu/program politik yang diusung oleh kandidat dan partai politik kandidat,

tetapi tetap tidak melupakan untuk menjatuhkan pilihan pada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan dan menekan kerugian yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, disinilah posisi media cukup berperan untuk menyampaikan isu-isu/program politik yang diusung oleh kandidat serta memperkenalkan calon-calon kandidat tersebut kepada khalayak ramai.

Selanjutnya adalah pendekatan identifikasi partai, menurut pendekatan ini pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya, seperti kandidat yang dirasakan cukup dekat dengannya pasti dia akan memilih kandidat tersebut atau seorang tokoh yang sangat disegani pasti akan menjadi pedoman baginya untuk memilih. Tokoh dalam hal ini yaitu pemimpin-pemimpin partai atau tokoh-tokoh nasional yang relatif dikenal luas secara nasional. Konsep ini relatif independen untuk menarik massa agar memilih partai, di mana seorang calon tersebut merupakan tokoh di partai tertentu. Masyarakat memilih partai tidak hanya karena daya tarik partai itu sendiri, tetapi lebih karena ada tokoh pimpinan partai politik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pendekatan sosiologis terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur 2010.

Alasan pemilihan Desa Labuhan Ratu sebagai lokasi penelitian ini didasarkan pada hasil prariset yang penulis lakukan pada tanggal 25 Mei 2010. Data prariset menunjukkan bahwa jumlah seluruh pemilih yang tercatat dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 8.738 pemilih. Pada Pemilu Legislatif tercatat 8223 (94,11%) pemilih yang memberikan hak suaranya dan pada Presiden tercatat 8327 (95,30%) pemilih yang memberikan hak suaranya. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, karena pemilih yang memberikan hak suara mereka mencapai persentase di atas 90% pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Pemilihan masyarakat etnis Lampung Abung didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara masyarakat adat yang kelompok Lampung Pepadun, etnis Lampung Abung memiliki marga yang lebih banyak dibandingkan dengan marga masyarakat adat Lampung lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma (1999: 14), bahwa masyarakat adat Lampung Abung memiliki sembilan marga (Abung Siwo Megou), sementara itu etnis lainnya seperti masyarakat adat Tulangbawang/Menggala hanya memiliki empat marga (Meggou Pak Tulang bawang), Masyarakat adat Lampung Waykanan/Sungkai memiliki lima marga (Buay Lima) dan masyarakat adat Pubian hanya memiliki tiga marga (Pubian Telu Suku). Dengan beragamnya marga yang dimiliki masyarakat Lampung Abung maka perilaku memilih masyarakat juga cenderung lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan masyarakat Adat Lampung lainnya.

Sembilan marga dalam masyarakat adat Abung Siwo Megou terdiri dari Buay Unyi, Buay Unyai, Buay Uban, Buay Subing, Buay Beliuk, Buay Kunang, Buay Selagai, Buay Anak Tuha dan Nyerupa. (Fachruddin, dkk, 1992: 24). Berdasarkan data prariset yang penulis lakukan di Desa Labuhan Ratu

Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, mayoritas masyarakat Abung Siwo Megou adalah yang berasal dari Buay Subing.

Adapun teori yang melandasi penelitian ini dikemukakan oleh J. Kristiadi (1994), bahwa variabel sosial budaya (*socio cultural*) secara kuantitatif memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan perilaku memilih masyarakat di pedesaan. Dengan kata lain, pengaruh panutan bersifat kuat terhadap kecenderungan perilaku memilih masyarakat, sehingga orientasi perilaku memilih masyarakat masih paternalistis.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Seberapa besarkah pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang ilmu politik serta mengembangkannya dalam penelitian ilmiah, dengan kajian mengenai pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga politik dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mengetahui perilaku memilih masyarakat adat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.